

BAB I

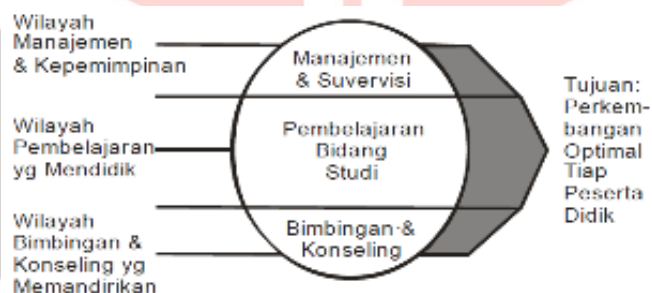
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan dan konseling di Indonesia, secara legal tercantum dalam undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 171 pada ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 menyatakan bahwa Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pada ayat 2 konselor yang sebagai kualifikasi pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik profesional yang memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Bimbingan dan konseling sebagai salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu para peserta didik mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Bimbingan dan konseling di sekolah akan senantiasa terkait dengan perubahan yang terjadi pada kehidupan siswa dan lingkungannya. Melalui layanan bimbingan dan konseling siswa dibantu agar dirinya mampu membaca dan mengubah ancaman (*threats*) menjadi sebuah tantangan (*challenge*) yang selanjutnya menjadi peluang (*opportunities*) sehingga mampu bertahan dan mengembangkan dirinya dalam kondisi lingkungan yang penuh dengan kompetisi dan ketidakpastian, Suherman (Dini, 2011: 2).

Pengembangan diri memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap konseli sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstra kulikuler. menegaskan bahwa bimbingan dan konseling tetap sebagai bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan (khususnya jalur pendidikan formal). Pelayanan pengembangan diri yang terkandung dalam Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) merupakan bagian dari kurikulum. Sebagian dari pengembangan diri dilaksanakan melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian pengembangan diri hanya merupakan sebagian dari aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Posisi bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dapat terlukiskan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Wilayah Pelayanan Bimbingan dan Konseling
Dalam Jalur Pendidikan Formal
(Depdiknas, 2008)

Standar Kualifikasi Akademik dan Profesional Konselor dalam aspek kompetensi profesionalitas mencakup: (1) memiliki kesadaran dan komit terhadap etika professional; (2) konsisten dan berintegritas tinggi dalam penerapan nilai-nilai profesi; (3) memahami arah dan kegiatan pengembangan profesi melalui penelitian; (4) menguasai kemampuan komunikasi inter dan antar profesi dan kolaborasi professional inter dan antar profesi; (5) belajar secara berkelanjutan untuk perkembangan personal dan professional.

Mengacu kepada Standar Akademik dan Profesional Konselor, Gysbers dan Henderson, (Depdiknas, 2006: 40) untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan seorang konselor harus mampu: (1) merancang kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling; (2) mengimplementasikan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling; (3) menilai proses dan hasil kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan penyesuaian-penyesuaian sambil jalan (*mid-course adjustments*) berdasarkan keputusan transaksional selama rentang proses bimbingan dan konseling dalam rangka memandirikan konseli (*mind competence*).

Penelitian Muqodas (2011: 2) posisi layanan bimbingan dan konseling yang kurang menguntungkan ini bila dibiarkan akan membuat layanan bimbingan dan konseling terus terpuruk. Di satu sisi, eksistensi bimbingan dan konseling memiliki legalitas yang telah diakui secara formal, siswa memerlukan layanan bimbingan dan konseling untuk perencanaan masa depannya. Namun di sisi lain, secara nyata pengakuan seluruh lapisan masyarakat pendidikan dan pemanfaatan layanan oleh siswa belum dimanfaatkan seoptimal mungkin. Pernyataan temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Ilfiandra, *et al* (2006: 22) terhadap konselor, siswa, guru, dan kepala sekolah. Menunjukkan bahwa umumnya kinerja konselor pada sekolah belum memuaskan, di Kabupaten Bandung Sebagian besar (64,28%) kinerja konselor masuk pada kategori tidak memuaskan, sebagian kecil (35,71%) masuk pada kategori memuaskan, dan tidak ada konselor yang menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan. Urutan aspek kinerja yang tidak memuaskan yang ditampilkan oleh konselor menyangkut pengetahuan tentang keterampilan memberikan layanan BK (36,74%), kepribadian konselor (29,85%), dan pengetahuan tentang layanan BK (21,28%).

Al Hakim (2011: 67) hasil penelitian tentang kinerja guru pembimbing di kota Bandung dari 74 orang guru bimbingan dan konseling 57 orang diantaranya (42,74%) berada pada kategori baik. Guru bimbingan dan konseling yang termasuk pada kategori cukup sebanyak 9 orang (11, 26%) dan guru bimbingan dan konseling pada

kategori kurang sebanyak 8 orang (10,83%). Artinya, sebagian besar guru bimbingan dan konseling SMA Negeri di Kota Bandung tahun ajaran 2011/2012 mampu berkinerja dengan baik.

Ningsih (2009: 127) mengungkap penelitian terhadap kompetensi konselor SMA di Kabupaten Cirebon. Data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap konselor SMA di kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas pokok sebagai konselor, *kompetensi Pedagogik* ditemukan yang menjawab tidak menguasai 0,00%, kurang menguasai, 21,11%, menguasai 65,33%, sedangkan yang sangat menguasai sebanyak 13,56%. *Kompetensi Kepribadian*, ditemukan yang menjawab tidak menguasai 0,00%, kurang menguasai, 8,71%, menguasai 71,76%, sedangkan yang sangat menguasai sebanyak 19,53 %. *Kompetensi Sosial*, ditemukan pada yang menjawab tidak menguasai 1,23%, kurang menguasai 22,23%, menguasai 62,46%, sedangkan yang sangat menguasai sebanyak 13,85%. *Kompetensi Profesional* ditemukan yang menjawab tidak menguasai 1,67%, kurang menguasai, 19,91%, menguasai 63,72%, sedangkan yang sangat menguasai sebanyak 14,70%.

Hasil penelitian Murad (2005: 202) dalam kompetensi konselor yang berlatar belakang Bimbingan Konseling di sekolah yang penyelenggaraan BK-nya baik tugasnya mencapai 72.89% (tinggi), tingkat performansi aktual kompetensi konselor yang berlatar belakang bimbingan konseling di sekolah yang BK-nya kurang baik tugasnya mencapai sebesar 67.23% (cukup), seterusnya tingkat performansi aktual kompetensi konselor yang berlatar belakang pendidikan non-BK di sekolah yang BK-nya baik tugasnya mencapai sebesar 66.48% (cukup), tingkat performansi aktual kompetensi konselor yang berlatar belakang pendidikan non-BK di sekolah yang BK-nya kurang memadai tugasnya hanya mencapai 59.46 % (cukup cenderung rendah). Penurunan yang terjadi pada pencapaian persentase tingkat performansi aktualnya, 72,89% (tinggi) turun menjadi 67.23% (cukup), 66.48% (cukup) dan kemudian 59.46% (cukup cenderung rendah) memperkuat dukungan bahwa latar belakang pendidikan dan keadaan penyelenggaraan BK-nya memberikan urunan bagi pencapaian tingkat performansi aktual kompetensi konselor profesional.

Profesi guru bimbingan dan konseling perlu tumbuh dan berkembang agar dapat memberikan layanan konseling dengan baik dalam perencanaan layanan bimbingan dan konseling, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan layanan bimbingan dan konseling. Setiap guru bimbingan dan konseling perlu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang merupakan suatu keharusan untuk kinerja dan layanan bimbingan dan konseling yang berkualitas. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, diperlukan adanya penelitian yang dapat mengungkap kualitas kinerja guru bimbingan dan konseling, sehingga peneliti mengambil judul “Profil Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas Negeri”. Melalui hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dilakukan intervensi lebih lanjut guna meningkatkan kinerja guru bimbingan dan konseling secara utuh.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Gambaran umum kompetensi berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas Kota Cimahi tahun 2012 yang sudah tersertifikasi diantaranya hanya tiga orang (14.28%) berada pada kategori baik. Adapun guru bimbingan dan konseling yang termasuk pada kategori cukup sebanyak sembilan guru bimbingan dan konseling (42.86%) dan pada kategori kurang sebanyak sembilan guru bimbingan dan konseling (42.86%). Artinya, guru bimbingan dan konseling di Kota Cimahi Kompetensi Profesionalnya kurang baik.

Taufiq (2009:28) mengemukakan yang dimaksud kompetensi adalah karakteristik sinergis dari kecenderungan-kecenderungan bertindak, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang ketika menghadapi situasi kerja. Selanjutnya, menurut Kartadinata (Taufiq, 2009:29) kompetensi merupakan sebuah kontinum perkembangan mulai dari proses kesadaran (*awareness*), akomodasi, dan tindakan nyata sebagai wujud kinerja.

kompetensi profesional (*professional competence*) menyangkut kemampuan (*ability*) untuk berfungsi secara efektif di dalam tugas-tugas yang dianggap esensial di dalam suatu profesi. Ada dua domain yang luas dalam kompetensi profesional. *Pertama* adanya kecakapan-kecakapan (*proficiencies*) spesifik untuk suatu profesi atau disiplin, meliputi: (1) disiplin-spesifik berbasis pengetahuan; (2) keterampilan teknis yang dianggap esensial di dalam profesi; dan (3) kemampuan untuk memecahkan tipe-tipe permasalahan yang dihadapi di dalam profesi. *Kedua*, konsep kompetensi profesional merepresentasikan karakteristik umum (*general characteristics*) individu yang memfasilitasi perkembangan dan pemeliharaan kompetensi profesional: kemampuan intelektual, ciri-ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap dan nilai-nilai.

Faiver, Eisengart, dan Colonna, 2004 (Depdiknas, 2008: 51), penguasaan kompetensi profesional konselor terbentuk melalui latihan dalam menerapkan kompetensi akademik dalam bimbingan dan konseling yang telah dikuasai itu dalam konteks otentik di sekolah atau arena terapan layanan ahli lain yang relevan melalui program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) berupa Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang sistematis dan sungguh-sungguh (*rigorous*). Program ini terentang mulai dari observasi dalam rangka pengenalan lapangan, latihan ketrampilan dasar penyelenggaraan konseling, latihan terbimbing (*supervised practice*) yang kemudian terus meningkat menjadi latihan melalui penugasan terstruktur (*self-managed practice*) sampai dengan latihan mandiri (*self-initiated practice*) dalam program pemagangan, kesemuanya di bawah pengawasan dosen BK/Konselor dan konselor pamong.

Kinerja guru bimbingan dan konseling menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang dimensi tugas utama dan indikator kinerja guru bimbingan dan konseling adalah aspek pelayanan bimbingan dan konseling: (1) Guru bimbingan dan konseling dapat menunjukkan landasan keilmuan dan esensi layanan bimbingan dan konseling pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan dalam perencanaan layanan bimbingan dan konseling; (2) Guru bimbingan dan konseling dapat menyusun atau

memilih instrumen, menganalisis data, mengaplikasikan dan mengadministrasikan, serta menggunakan hasil asesmen; (3) Guru bimbingan dan konseling dapat merancang program bimbingan dan konseling;

Aspek pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling: (4) Guru bimbingan dan konseling dapat mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL); (5) Guru bimbingan dan konseling dapat mengimplementasikan RPL (Satlan/Satkung) dalam pelayanan bimbingan dan konseling; (6) Guru bimbingan dan konseling dapat mengimplementasikan prinsip pendidikan dan dimensi pembelajaran dalam pelayanan bimbingan dan konseling.; (7) Guru bimbingan dan konseling dapat mengaplikasikan tujuan, prinsip, azas, dan fungsi dalam pelayanan bimbingan dan konseling; (8) Guru bimbingan dan konseling dapat memfasilitasi pengembangan kehidupan pribadi, sosial, kemampuan belajar dan perencanaan karir; (9) Guru bimbingan dan konseling dapat memfasilitasi perolehan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis; (10) Guru bimbingan dan konseling dapat memfasilitasi pengembangan sikap, perilaku dan kebiasaan belajar; (11) Guru bimbingan dan konseling dapat menerapkan pendekatan/model konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling; (12) Guru bimbingan dan konseling dapat melaksanakan pendekatan kolaboratif dengan pihak terkait dalam pelayanan bimbingan dan konseling; (13) Guru bimbingan dan konseling dapat mengelola sarana dan biaya pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling; (14) Guru bimbingan dan konseling dapat melakukan penilaian proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling.

Aspek evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling: (15) Guru bimbingan dan konseling dapat mengevaluasi program bimbingan dan konseling.; (16) Guru bimbingan dan konseling dapat menyusun laporan pelaksanaan program (lapelprog) berdasarkan hasil evaluasi program bimbingan dan konseling; (17) Guru bimbingan dan konseling dapat menentukan arah profesi (peran dan fungsi guru bimbingan dan konseling); (18) Guru bimbingan dan konseling dapat

merancang, melaksanakan, dan memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan penelitian difokuskan kepada salah satu guru bimbingan dan konseling yang terbaik di sekolahnya dalam hasil Uji Kompetensi Guru Bimbingan dan konseling tahun 2012 untuk mengetahui gambaran kinerja guru bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Cimahi lebih rinci dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana gambaran umum kinerja guru bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Cimahi menurut evaluasi diri guru bimbingan dan konseling?
2. Bagaimana gambaran umum kinerja guru bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Cimahi menurut pengawas?
3. Bagaimana gambaran umum kinerja Guru Bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Cimahi menurut koordinator bimbingan dan konseling?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja guru bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Cimahi menurut penilaian pengawas dan koordinator bimbingan dan konseling?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara umum kinerja guru bimbingan dan konseling. Adapaun tujuan khusus penelitian adalah untuk mengungkap:

1. Gambaran umum kinerja Guru bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Cimahi menurut evaluasi diri guru bimbingan dan konseling.
2. Gambaran umum kinerja Guru bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Cimahi menurut pengawas.

3. Gambaran umum kinerja Guru bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Cimahi menurut koordinator bimbingan dan konseling.
4. Gambaran umum kinerja Guru bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Cimahi menurut perbedaan penilaian pengawas dan koordinator bimbingan dan konseling.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, hasil penelitian ini memiliki kegunaan, sebagai berikut :

1. Guru bimbingan dan konseling di sekolah, dapat meningkatkan kinerja guru bimbingan dan konseling.
2. Pengawas Dinas Pendidikan Kota Cimahi menjadikan bahan pertimbangan untuk program peningkatan kinerja guru bimbingan dan konseling.
3. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, untuk memperbanyak pelatihan-pelatihan, seminar dan workshop untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kinerja guru bimbingan dan konseling.
4. Kepada peneliti selanjutnya, untuk memberikan masukan mengenai permasalahan tentang profil kinerja guru bimbingan dan konseling yang signifikan untuk dikaji.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab I dipaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II disajikan teori yang relevan sebagai landasan dilakukannya penelitian, yang meliputi makna kompetensi, ciri-ciri kompetensi, pengukuran kompetensi, konselor professional, pengembangan konselor professional.

Pada Bab III dibahas mengenai lokasi dan sampel penelitian, langkah-langkah penelitian, pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional variabel, pengembangan instrumen dan pengumpulan data.

Pada Bab IV disajikan deskripsi dan hasil temuan penelitian yang mencakup hasil penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian.

Pada Bab V disajikan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian yang meliputi rekomendasi bagi para guru bimbingan dan konseling di sekolah Pengawas Sekolah Menengah Atas di Kota Cimahi, serta bagi peneliti selanjutnya.

